

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT
MELALUI BIDANG SWASEMBADA PANGAN DI
DESA PULAU LANCANG KECAMATAN BENAI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial Program Pendidikan Strata Satu
Program Studi Administrasi Negara*



Oleh :

TRI RAHADI ZULYA
NPM. 200411050

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2024**

TANDA PERSETUJUAN

JUDUL : PERAN PEMERINTAH DESA DALAM
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI
BIDANG SWASEMBADA PANGAN DI DESA
PULAU LANCANG KECAMATAN BENAI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NAMA : TRI RAHADI ZULYA
NPM : 200411050
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS : UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I



DESRIADI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1022018302

PEMBIMBING II



SARJAN M, S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

PENGESAHAN

Diperiksa dan diserahkan oleh Panitia Ujian Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 10

Bulan : September

Tahun : 2024

Tim Penguji

Ketua



EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
NIDN.1002059002

Sekretaris



SARJAN M, S.Sos., M.Si
NIDN.1008128002

1. DESRIADI, S.Sos., M.Si

()

2. ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si

()

3. SAHRI MUHARAM, S.Sos., M.Si

()

Mengetahui

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Islam Kuantan Singingi

Dekan,



RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN.1030058402

ABSTRAK

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI BIDANG SWASEMBADA PANGAN DI DESA PULAU LANCANG KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

OLEH

TRI RAHADI ZULYA
NPM. 200411050

Peranan pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat memanglah sangat penting, bagaimanapun pemerintah desalah yang tahu bagaimana potensi yang ada di desanya. Jika pemerintah desa bisa mengembangkan potensi yang ada di desa tersebut dan memanfaatkan sumber daya alam maupun sumberdaya manusianya dengan baik, maka desa tersebut akan maju dan kesejahteraan masyarakatnya akan terjamin. Seperti Pemerintah Desa Pulau Lancang yang meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui program swasembada pangan. Program swasembada pangan ini di Desa Pulau Lancang ini tercipta karena melihat lahan pertanian padi yang luasnya mencapai 28,5 hektar. Dan untuk mewujudkan program swasembada pangan ini, pemerintah desa berupaya untuk menciptakan pertanian modern. Dimana pemerintah desa bekerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi memberikan bantuan alat-alat pertanian yang modern, pupuk, pembasmi hama dan pembangunan Pamsimas serta aliran irigasi. Tidak hanya itu pemerintah desa selalu mengutus setiap kelompok tani untuk mengikuti pelatihan pertanian dari pihak penyuluh pertanian Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan pelatihan-pelatihan ini diharapkan petani bisa lebih berkembang dan berpikir lebih maju dalam sitem pertanian. Berkat bantuan dari pemerintah desa yang bekerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi serta pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh penyuluh pertanian, maka hasil pertanian padi di Desa Pulau Lancang semakin meningkat. Hasil panen yang melimpah maka kebutuhan pangan masyarakat Desa Pulau Lancang akan terpenuhi bahkan bisa menyimpan padi sebagai tujuan untuk program swasembada pangan. Dengan swasembada pangan maka kesejahteraan masyarakat Desa Pulau Lancang akan terjamin. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara, dokumentasi, dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, dapat diketahui bahwa peran pemerintah desa dalam peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat melalui bidang swasembada pangan di Desa Pulau Lancang Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi dapat terwujud.

Kata Kunci : Peranan, Kesejahteraan, Swasembada Pangan

ABSTRACT

THE ROLE OF VILLAGE GOVERNMENT IN IMPROVING COMMUNITY ECONOMIC WELFARE THROUGH FOOD SELF-SUFFICIENCY FIELD IN PULAU LANCANG VILLAGE BENAI DISTRICT, KUANTAN SINGINGI DISTRICT

BY

TRI RAHADI ZULYA
NPM. 200411050

The role of the village government in improving the economic welfare of the community is very important, however, it is the village government that knows the potential that exists in its village. If the village government can develop the potential that exists in the village and make good use of its natural and human resources, then the village will progress and the welfare of its people will be guaranteed. Like the Pulau Lancang Village Government which is improving the welfare of its community through a food self-sufficiency program. This food self-sufficiency program in Pulau Lancang Village was created because of seeing rice farming land which covers an area of 28.5 hectares. And to realize this food self-sufficiency program, the village government is trying to create modern agriculture. Where the village government collaborates with the Kuantan Singingi Regency Agriculture Service to provide assistance with modern agricultural tools, fertilizer, pest control and the construction of Pamsimas and irrigation flows. Not only that, the village government always sends each farmer group to take part in agricultural training from the Kuantan Singingi Regency agricultural instructor. With this training, it is hoped that farmers can develop more and think more advanced in agricultural systems. Thanks to assistance from the village government in collaboration with the Kuantan Singingi District Agriculture Service as well as training provided by agricultural extension workers, rice farming yields in Pulau Lancang Village are increasing. With abundant harvests, the food needs of the people of Lancang Island Village will be met and they can even store rice as a goal for the food self-sufficiency program. With food self-sufficiency, the welfare of the people of Lancang Island Village will be guaranteed. This type of research is qualitative using interview, documentation and observation data collection methods. Based on the results of research in the field, it can be seen that the role of the village government in improving the economic welfare of the community through the field of food self-sufficiency in Pulau Lancang Village, Benai District, Kuantan Singingi Regency can be realized.

Keywords : Village, Welfare, foot Self-Sufficiency

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dengan lahirnya Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Membuat Kebijakan Tentang Desa Dalam Memberi Pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat Desa yang di tuju kan bagi kesejahteraan masyarakat. Konsep yang sering di munculkan dalam proses pemberdayaan adalah konsep kemandirian di mana program-program pembangunan di rancang secara sistematis agar individu maupun masyarakat menjadikan subjek dari pembangunan. Kegagalan berbagai program pembangunan perdesaan di masa lalu adalah di sebabkan antara lain karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat. Proses pembangunan lebih mengedepankan paradigma politik sentralistis dan dominannya peranan Negara pada arus utama kehidupan bermasyarakat.

Abdul (2014:1), pemerintah dengan segala perangkatnya merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan Negara. Semakin baik peran pemerintah dalam penyelenggaraan negara, semakin baik pula peningkatan pembangunan negara dan pada akhirnya berpengaruh pula pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di harapkan dapat di wujudkan dalam bentuk peningkatan pembangunan di segala bidang kepada masyarakat secara merata. Salah satu peran pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat melalui perhatian terhadap berbagai usaha yang merupakan mata pencaharian masyarakat. Kegiatan pemberdayaan ini

di harapkan dapat di sesuaikan dengan situasi dan kondisi usaha masyarakat serta sumber daya alam di lingkungan tersebut.

Tadanugi (2020), dalam mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pemerintah desa sebagai mana menyelenggara kewajiban dalam merumuskan program - program yang tepat untuk upaya dengan memberikan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Di mana pemerintah yang di esensi kan adanya perubahan di harapkan berlangsung dalam berbagai dimensi kehidupan dalam berbagai lapisan, kehidupan masyarakat yang berada dalam suatu wilayah penyelenggaraan pemerintahan.

Amanat Pemberdayaan tercantum dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada BAB XIV tentang Pembinaan dan Pengawasan Pasal 112 ayat 3 memiliki arti bahwa pemerintah desa berkewajiban menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa; meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.

Karbulah, Yaya & Aliyudin (2018:92), Oleh karena itu desa memiliki peran yang cukup penting dalam memberikan pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. karena pemerintahan desa secara umum memiliki wewenang yang strategis untuk mengendalikan kehidupan masyarakat atau dengan kata lain pemerintah desa memeiliki seperangkat aturan baku yang tertulis

yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat yang termuat dalam Undang-Undang perdesaan yang harus di taati oleh masyarakat yang hidup dan tinggal di desa tersebut, di samping itu adanya peraturan lain yang tumbuh dan berkembang dari hasil prakarsa masyarakat setempat yang membedakan dengan masyarakat lainnya seperti adat istiadat atau kearifan lokal yang berkembang di dalam masyarakat setempat.

Desa Pulau Lancang merupakan desa yang terletak di wilayah Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Pulau Lancang adalah petani padi dengan luas sawah 29 hektar. Dengan bertani padi masyarakat Desa Pulau Lancang dapat mengelola sumber daya yang dimiliki agar berjalan secara efektif dan efisien, dengan mengelola sumber daya para petani dapat memperoleh keuntungan yang setinggi-tingginya. Mengelola sumber daya yang dimiliki oleh para petani yaitu, dengan pembangunan pertanian yang mengarah pada kemajuan dalam bidang usaha tani, dengan perencanaan pertanian regional terpadu dan mengembangkan usaha tani menuju ke arah yang lebih baik.

Kahar (2010), pemenuhan kebutuhan pangan nasional dari produksi padi dalam negeri tampaknya masih sulit untuk direalisasikan. Kebutuhan pangan nasional dapat terpenuhi apabila strategi pembangunan mampu memberikan solusi. Strategi yang dimaksud harus memiliki karakteristik, memiliki jangkauan kemampuan memecahkan masalah, dan ketika strategi ini diimplementasikan maka persoalan akan dapat diatasi. Upaya pemerintah untuk mengatasi kendala dan masalah usaha tani telah menetapkan pengembangan usaha tani untuk meningkatkan produksi padi. Permasalahan bertambah kompleks ketika masih

belum kuatnya kelembagaan petani, terutama dalam hal manajemen, pengelolaan keuangan dan akses pasar. Permasalahan tersebut antara lain disebabkan kurangnya akses teknologi pada tingkat petani, serta lemahnya kelembagaan pada tingkat petani.

Namun di desa Pulau Lancang pemerintah desanya berusaha untuk meminimalisir permasalahan kegagalan hasil usaha tani padi pada masyarakat desa Pulau Lancang dengan pembangunan pintu air, batu baronjong, irigasi serta infrastruktur lainnya, seperti jalan di aspal dan perbaikan jembatan. Tidak hanya pada bidang pembangunan, pemerintah desa Pulau Lancang juga memberikan bantuan pupuk dan traktor untuk membajak sawah.

Ilham (2010), Padi sebagai komoditas pangan utama mempunyai nilai strategis yang sangat tinggi, sehingga diperlukan adanya penanganan yang serius dalam upaya peningkatan produktivitasnya. Besarnya peran pemerintah dalam pengelolaan komoditas pangan khususnya padi dapat dilihat mulai dari kegiatan pra produksi seperti penyediaan bibit unggul, pupuk, obat - obatan, sarana irigasi, kredit produksi dan penguatan modal kelembagaan petani. Usaha peningkatan produksi dan pendapatan usaha tani padi tidak akan berhasil tanpa penggunaan teknologi baru baik dibidang teknis budidaya, benih, obat-obatan dan pemupukan.

Jika segala kebutuhan kegiatan pra produksi seperti penyediaan bibit unggul, pupuk, obat - obatan, sarana irigasi sudah terpenuhi dengan baik, maka desa pulau lancang akan menghasilkan produksi padi dengan lebih baik dan memungkinkan desa Pulau Lancang untuk berswasembada pangan.

Swasembada pangan atau kemandirian pangan merupakan kondisi dimana suatu daerah mampu memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam kawasannya sendiri, yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat. Dalam upaya menciptakan swasembada pangan di Indonesia, pemerintah memprogramkan swasembada pangan dari lingkup terkecil yaitu desa.

Desa Pulau Lancang merupakan salah satu penghasil tanaman padi dengan luas sawah 28,5 hektar di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi yang berpotensi untuk swasembada pangan dimana setiap kali panen 1 hektar lahan menghasilkan lebih kurang 6,5 ton padi. Total setiap kali panen menghasilkan 185 ton padi. Jika satu orang setiap bulan mengkonsumsi beras sebanyak 10 kg dengan jumlah penduduk desa pulau lancang sebanyak 669 orang, maka setiap bulannya masyarakat desa Pulau Lancang akan mengkonsumsi beras lebih kurang 6.690 kg. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “Peran Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat Melalui Bidang Swasembada Pangan Di Desa Pulau Lancang Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang, penulis dapat mengidentifikasi masalah yang menjadi landasan dari penyusunan tulisan ini dan dasar dari tujuan penelitian. Permasalahan yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

Bagaimanakah Peran Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan

Perekonomian Masyarakat Melalui Bidang Swasembada Pangan Di Desa Pulau Lancang Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : Peranan Pemerintah Desa dalam peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat melalui bidang swasembada pangan di Desa Pulau Lancang Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis, Sebagai bahan informasi ilmiah penelitian-penelitian yang mengkaji otonomi daerah, dan pelayanan publik dan di harapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai persoalan pemerintah daerah dan sebagai tambahan bahan kajian atau literatur dalam Ilmu Politik Pemerintahan.
2. Secara Praktis, Sebagai bahan pemikiran dan pertimbangan pemerintah terhadap masyarakat di daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat petani padi.
3. Bagi penulis di harapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang peranan Pemerintah Desa dalam peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat melalui bidang pertanian padi sebagai upaya swasembada pangan di Desa Pulau Lancang.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian baik melalui observasi dan wawancara mengenai “ Peranan Pemerintah Desa dalam peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat melalui bidang swasembada pangan di Desa Pulau Lancang Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi” maka dapat penulis simpulkan bahwa peranan pemerintah Desa Pulau Lancang sudah berjalan dengan baik dengan meningkatnya hasil panen padi dengan terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat Desa Pulau Lancang dan bisa berswasembada pangan.

6.2 Saran

Saran dalam penelitian ini adalah pemerintah Desa Pulau Lancang lebih banyak mengadakan pelatihan-pelatihan dalam pertanian dan terus berinovasi dalam pertanian modern. Dan juga terus kembangkan bibit padi unggul agar hasil panen padi di Desa Pulau Lancang terus meningkat dengan hasil yang memuaskan. Swasembada pangan merupakan program yang sangat bagus. Untuk itu di harapkan pemerintah Desa Pulau Lancang untuk terus memeberikan semangat dan motivasi kepada petani agar petani terus semangat untuk bertani, karena jika masyarakat tidak berminat lagi bekerja sebagai petani, maka masyarakat juga yang akan rugi, dimana harga beras yang terus naik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka setia.
- Anwas, Oos M. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asmani. 2012. *Teori Sosiologi*. Jakarta: Grafindo Persada
- Hardiansyah. 2015. *Komunikasi Pelayanan Publik, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta : Gava Media.
- Hasibuan, Malayu S.P, 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Askar.
- Hayat, 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Moleong, L. J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Siagian, Sondang .P. 2014. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Siburian, Fandri. 2015. *Analisis produksi Tanaman Pangan Padi (Oryza sativa, L) Kabupaten Deli Serdang*. Medan.
- Sigit Hermawan dan Amirullah. 2016. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*. Media Nusa Creative. Malang.
- Soekanto Soerjono. 2012. *Teori Peranan*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- _____. 2018. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- _____. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto Edi. 2017. *Analisa Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama

Syafiie Inu Kencana. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Thoha, Miftah. 2012. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

_____. 2012. *Ilmu Administrasi public Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

B. Jurnal atau Skripsi

Abdul, et al. 2014. *Impact of Employee Job Satisfaction On Their Performance A case Study Of Banking Sector In Muzaffargarh District, Pakistan*. Global Journal of Human Resource Management, Vol. 2, No. 4, December.

Hendrik, Okta. 2013. “Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Tanjung Keranjang Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau.” eJournal Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Mulawarman Vol. 1(No. 2): 459–69. ejournal.ip.fisip-unmul.co.id (1 Oktober, 2019)

Ilham, T. 2010. *Diversifikasi Pangan dan Penyuluhan Pertanian Sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan Nasional*.

Indriyati dan Hayat. 2015. *Peranan Perawat dalam Kerangka Kinerja Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Keperawatan*. Jurnal Transformasi Administrasi Vol.4 Nomor 1 Tahun 2015. Hal 828-845.

Iskandar, Hartoyo, Ujang Sumarwan, dan Ali Khomsan. 2010. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga*. Bogor: E- Jurnal Departemen Gizi Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.

Kahar, M. 2010. *Analisis Pola Konsumsi Daerah Perkotaan Dan Pedesaan Serta Keterkaitannya Dengan Karakteristik Sosial Ekonomi di Propinsi Banten*. Tesis. Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Karbulah, Yaya, & Aliyudin. 2018. *Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Tani*. Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam.

Putra Ikatama. 2020. *Kualitas Pelayanan Administarsi Kependudukan Di Desa Pembatang Kecamatan Pangena Kabupaten Kuantan Singingi*. Skripsi S1, Pekanbaru : Universitas Islam Riau

Tadanugi. 2020. "Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso". Jurnal Ilmiah Administratie, Vol.12 No.1

Wahdaniyah Nur Siti. 2021. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Inovasi Desa (Pid) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Magersari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal. Skripsi S1, Jawa Tengah : Universitas Tidar

C. Peraturan Perundang- Undangan

Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 tentang pelayanan publik.

Subbag Hukum BPK 2015, Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Mendirikan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Perwakilan Provinsi RIAU.

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Membuat Kebijakan Tentang Desa Dalam Memberi Pelayanan.

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada BAB XIV tentang Pembinaan dan Pengawasan Pasal 112 ayat 3.

Undang - Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Desa.